

Kompilasi Laporan Pos Kupang Pemberlakuan Pas Lintas Batas (PLB) RI - RDTL Julianus Akoit¹

Pengantar Redaksi:

JELANG akhir 2007 lalu, Fundacao Fatu Sinai Oe-Cusse, sebuah LSM dari Distrik Oecusse, Timor Leste, dibantu Lembaga Advokasi Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) NTT, menggelar dialog yang melibatkan ribuan warga 24 desa di 10 titik sepanjang garis perbatasan RI - Timor Leste. Isu yang dibahas dalam dialog tapal batas, yaitu masalah pemberlakuan pas lintas batas (PLB), pasar tapal batas dan pembentukan lembaga adat bersama. Akhir Januari 2008 lalu, Direktur Departemen Bilateral Kementerian Luar Negeri Timor Leste, Marcos da Costa, memberi sinyal PLB segera diberlakukan Juli 2008. Tapi harapan itu sirna ketika Presiden Timor Leste, Ramos Horta, terluka parah ditembak gerombolan tentara pemberontak yang dipimpin Mayor Alfredo Reinado, Senin (11/2/2008) dini hari. Konflik berdarah ini berdampak pada kelanjutan realisasi hasil dialog itu. Lalu bagaimana selanjutnya? Wartawan Pos Kupang, Julianus Akoit, menurunkan catatannya setelah mengikuti dialog itu di tapal batas.

Pendahuluan: Kirim air mata duka lewat sungai

NYONYA Maria Cun Romea (50) mengacungkan jari tangannya lalu berdiri. Sejenak ia menarik napas dalam-dalam. Matanya berkaca-kaca, menahan isak tangis. Suaranya terbata-bata dan terdengar parau.

"Kalo on bin le susar, ela le'uf, het tamat fin, ka tem teu batas sonu, hit paok ninik nok hit loet pilu taba batas noel," ujarnya. Artinya seperti ini: Kalau ada keluarga yang meninggal dunia, kami tidak bisa menyeberang ke desa sebelah untuk menyampaikan ucapan turut berduka cita. Kami hanya datang di batas tepi sungai lalu mengirim nyala lilin, air mata dan uang duka cita lewat air yang mengalir di sungai.

Sejenak perempuan paruh baya asal Sakato, Oecusse, itu, mengedarkan pandangannya berkeliling. Semua yang hadir hanya tertunduk diam. Tidak ada yang bersuara. Semua membisu. Lalu ia melanjutkan, "Hit toet neu hit palenat nua sin, nan sa moe kit on ia?" ujarnya dalam nada tanya. Artinya kira-kira demikian: Coba kita tanya kepada dua pemerintah (maksudnya Indonesia dan Timor Leste, Red), kenapa kita diperlakukan seperti ini?

¹ Tulisan ini merupakan laporan berseri Pos Kupang tanggal 14-16 Februari 2008, hasil liputan Julianus Takoit. Dickey dari link berikut: http://www.indonesia.com/poskup/2008/02/14/edisi14/utama_4.htm;
http://www.indonesia.com/poskup/2008/02/15/edisi15/utama_4.htm
http://www.indonesia.com/poskup/2008/02/16/edisi16/utama_4.htm

Tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Semua diam membisu. Lalu ia menjawab sendiri pertanyaan itu. "Kalo susar bi panin i, hae-hae, ka teb haek tapal batas. Hai tob hai kam luem fa. Haim toit nabe he noko panin nae nabae taman fin noko nae nabae taman nem Ambenu. Karena hit naha hit kah tahoin sin bin neola nan," tandasnya. Artinya kira-kira demikian: Kami tidak suka diperlakukan seperti ini. Kalau lagi susah, kita mesti datang bertemu di rumah, bukan datang berdiri di tapal batas, di bawah pohon atau di tepi sungai. Karena kita dilahirkan bukan di bawah pohon atau di tepi sungai. Kita punya nilai dan harga diri sebagai manusia.

Masih banyak unek-unek yang disampaikan warga dua desa di tapal batas, saat digelar dialog bersama di tepi Sungai Noemoto, Sakato - Wini. Sekitar 600 warga dari Timor Leste dan Wini (Indonesia) hadir. Umumnya mereka menyatakan sangat resah dan gelisah, karena tali persaudaraan, hubungan kekerabatan dikekang oleh pemerintah dua negara, RI - Timor Leste. Selama sembilan tahun, kegelisahan itu menyiksa batin warga yang tinggal di dekat tapal batas.

Misalnya, untuk mengunjungi saudara laki-lakinya yang tinggal di Desa Sakato (Timor Leste), yang menikah dengan gadis seberang, Barto Naimeko harus ke Atambua, Kabupaten Belu, untuk mengurus paspor dan visa, baru bisa menyeberang ke desa sebelah. Padahal, jarak rumahnya dengan rumah saudara laki-lakinya cuma 150 meter. Urus makan dan minum saja susah. Apalagi mau urus paspor dan visa yang mahal. Dapat uang dari mana?

"Saya cuma seorang petani kecil di desa. Karena ingin melepas kangen dengan saudara kandung, saya harus menempuh perjalanan sejauh 150 kilometer ke Atambua untuk mengurus paspor dan visa dengan ongkos yang sangat mahal. Padahal jarak rumah saya dengan rumah saudara di desa sebelah hanya 150 meter dan cuma butuh waktu dua menit sudah sampai. Tapi sekarang semua itu sangat sulit. Jika nekat menyeberang diam-diam, takut ditangkap tentara. Pasti urusan jadi panjang," jelas Barto Naimeko.

Dalam dialog di tapal batas, warga minta agar paspor dan visa diganti dengan pas lintas batas (PLB). "PLB itu diurus oleh masing-masing kepala desa di tapal batas. Jika ada warga yang mau menghadiri acara kedukaan, pesta adat, pesta nikah, pesta Natal dan Paskah, bisa pakai PLB. Boleh ada uang administrasi yang dipungut oleh kepala desa.

Tapi pungutan itu tidak boleh terlalu besar dan membebani warga," tukas Naimeko. Direktur Lembaga Advokasi Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) NTT, Victor Manbait, S.H, yang memprakarsai dialog warga di tapal batas, menjelaskan tanda khusus PLB harus disepakati bersama dua negara. Dan pemberlakuan PLB sudah sangat mendesak. "Soal pemberlakuan PLB, mesti ada kesepakatan teknis pelaksanaannya oleh Timor Leste dan RI. Sambil menunggu kebijakan pemberlakuan PLB, saya kira pemerintah desa di dua negara yang ada di tapal batas bisa memberlakukan surat jalan dengan diketahui oleh aparat keamanan yang bertugas di tapal batas," jelas Manbait. Ia juga mengingatkan, PLB hanya berlaku bagi warga desa di tapal batas. Tidak untuk warga lainnya. Dan berdasarkan diskusi dengan warga di tapal batas, pihaknya sudah mengusulkan kepada pemerintah Timor Leste dan RI untuk memberlakukan kartu PLB itu dalam jangka waktu 2 tahun, dan dapat diperpanjang bila dibutuhkan.

"Dari diskusi dengan warga di tapal batas, mereka sepakat uang administrasi Kartu PLB sebesar Rp 5.000,00/KK dan kartu PLB sementara Rp 1.500,00/KK (lima anggota keluarga). Jika jumlahnya melebihi lima orang, diperhitungkan sebagai satu KK baru lagi," jelas Manbait.

Lalu dalam situasi mana sajakah kartu PLB itu diterbitkan? "Jadi kartu PLB atau surat keterangan jalan yang diterbitkan oleh pemerintah desa di tapal batas hanya untuk maksud kegiatan atau aktivitas yang terkait dengan masalah sosial, budaya dan ekonomi di daerah tapal batas. Bukan terkait dengan masalah politik, keamanan dan soal lainnya," tandas Manbait.

Selanjutnya Manbait merincikan, aktivitas sosial yang dimaksud adalah kunjungan keluarga biasa, urusan kelahiran anak, perkawinan dan kematian. Selanjutnya aktivitas terkait hari raya agama, seperti Natal, Paskah dan Peringatan Hari Arwah. Yang masuk kategori aktivitas budaya, misalnya kunjungan persahabatan melalui kegiatan olahraga dan kesenian (festival budaya), ritual-ritual adat yang terkait kelahiran, kematian dan perkawinan, ritual ke rumah adat atau ke faot kanaf (batu pemali) dan oe kanaf (air pemali).

Melepas rindu di Pasar Pua Manus

DI SAMPING aktivitas sosial dan budaya, warga desa di perbatasan TTU - Oecusse mengungkapkan relasi sosial dan ketergantungan satu sama lainnya lewat aktivitas ekonomi. Tertutupnya akses warga perbatasan dalam mengungkapkan relasi sosial-ekonomi ini menimbulkan sejumlah tindakan menyimpang yang mengganggu keamanan dan ketertiban di perbatasan.

"Kami sering membantu saudara-saudara kami di Oecusse dengan cara menjual sembako," tukas Fridus Kolo dari Desa Buk, Kecamatan Miomaffo Timur, ketika digelar dialog tapal batas di tepi Sungai Noel Ekat. Sungai ini lebarnya sekitar 150 meter, menjadi tanda batas teritorial antara Desa Napan (TTU/RI) - Desa Oesilo dan Desa Bobemeto (Oecusse/Timor Leste).

Namun Kolo mengakui bisnis sembako yang dilakoninya bersama warga lainnya dijalankan secara diam-diam melalui "jalan tikus". Ia harus menyeberangi lembah dan mendaki gunung seraya memanggul karung atau kardus berisi sembako.

"Kami harus berangkat pagi-pagi benar, sekitar pukul 04.00 wita. Menyeberang perbatasan lewat jalan tikus. Lalu pulang kembali ke desa ketika menjelang malam," tutur Kolo.

Tertatih-tatih melalui jalan becek, merunduk dan menerobos di antara belukar berduri, tergelincir di tebing bukit yang curam dan mendaki gunung batu dengan nafas tersengal adalah pengalaman biasa bagi Kolo dan warga lainnya. "Terpaksa itu kami lakukan untuk menghindari kejaran tentara di perbatasan. Jika tertangkap, habislah kami," tukasnya. Bila kepergok tentara, tutur seorang bapak, biasanya barang bawaan disita. "Syukur kalau yang pergoki tentara yang punya belas kasihan kepada rakyat kecil. Paling dia cuma menasihati lalu menyuruh pergi setelah menyita barang dagangan kami. Tapi, bila bertemu anggota yang kejam dan bengis, pasti kami dihukum fisik. Kadang dipukul dan ditendang dengan sepatu bot. Yang paling ditakuti bila tentara pergoki rombongan pedagang yang ada wanitanya. Kami yang pria hanya menahan sakit dan amarah di dada karena tidak tega melihat wanita diinterogasi. Kalau sudah begitu, kami yang pria menawarkan jalan damai," kisahnya.

Meski demikian, lanjutnya, mereka tidak akan berhenti dagang sembako lewat 'jalan tikus'. Main kucing-kucingan dengan tentara, kata mereka, sudah risiko dalam bisnis. "Dagang di perbatasan untung besar. Untungnya bisa tiga kali lipat. Tapi kalau barang disita tentara, kami anggap itu risiko. Tapi kami tidak akan berhenti. Kami akan dagang sembako terus sampai kami tidak kuat lagi berjalan," sambung salah seorang ibu. Ramiro Paxaio Bano (34), staf manajer dari Fundacao Fatu Sinai Oecusse, mengatakan dari dialog tapal batas, semua warga menginginkan dibuka pasar tradisional di daerah tapal batas. "Hampir semua warga yang ikut dialog mengusulkan agar pemerintah membuka pasar Puah - Manus (sirih dan pinang, Red), yaitu pasar tradisional yang pelakunya adalah warga lokal yang tinggal di sekitar perbatasan. Dengan cara ini, perdagangan ilegal lewat 'jalan tikus' bisa dihindari," jelas Ramiro.

Dari kontak dagang di Pasar Puah - Manus ini, lanjutnya, warga juga bisa melepas kangen dan rindu bertemu sanak keluarga. "Jadi selain berdagang, pasar juga menjadi arena dan sarana untuk melepas kangen dengan warga seberang yang datang berjualan atau berbelanja," terang Ramiro.

Dalam dialog batas yang digelar terakhir di Napan, Miomaffo Timur, lanjut Ramiro, warga perbatasan dua negara sudah sepakat menetapkan 10 titik lokasi untuk dijadikan lokasi pasar tradisional. Yaitu titik Noemeto untuk warga yang berdomisili di perbatasan Kelurahan Humusu C (Wini/TTU) dengan warga Sakato (Oecusse/Timor Leste); titik Alit/Naijamuti untuk warga yang berdomisili di perbatasan Manamas, Bakitolas, Benus, Nelu, Sunbaki (TTU/RI) dengan warga Nipani, Lakufoan, Oetfo (Oecusse/Timor Leste); titik Noelkuneses, untuk warga yang berdomisili di Desa Banain A, Banain B, Banain C (TTU/RI) dengan warga Desa Noke Oelulan, Baki, Te Nae, Naimeko (Oecusse/Timor Leste).

Berikutnya, titik Noel Ekat, untuk warga di perbatasan Napan, Tes, Buk, Sainoni, Haumeni (TTU/RI) dengan warga Desa Oesilo, Tumin, Kiubiselo, Non Kikan dan Bobometo (Oecusse/Timor Leste). Titik Kaen Fen, untuk warga di perbatasan Nainaban, Inbate, Sunkaen (TTU/RI) dengan warga Desa Nibin dan Ustaqueno (Oecusse/Timor Leste). Titik Haumeni Ana, untuk warga di perbatasan Oeolo, Batnes, Haumeni Ana dan Nilulat (TTU/RI) dengan warga Naituna dan Nunkolo (Oecusse/Timor Leste).

Selanjutnya, titik Nun Isu, untuk warga Desa Manusasi dan Tubu (TTU/RI) dengan warga Desa Haemnanu dan Pope (Oecusse/Timor Leste). Titik Tu - Fuf, untuk warga Desa Tasinifu (TTU/Timor Leste) dengan warga Desa Malelat, Kusi dan Mahata (Oecusse/Timor Leste). Titik Los Am, untuk warga Naekake A, Naekake B dan Noelelo (TTU/RI) dengan warga Desa Usi Taco dan Hau - Uf (Oecusse/Timor Leste). Titik Noem Mna, untuk warga Desa Nun Ana, Netemnanu Selatan dan Netemnanu Utara, Taloi (TTU/RI) dengan warga Desa Lamas, Naktuka, Citrana, Bene Uka di Oecusse/Timor Leste.

Barang apa saja yang dijual dan siapa saja yang berjualan di sana? "Pasar tradisional di tapal batas ini hanya diperuntukkan bagi warga yang berdomisili di tapal batas. Pedagang dan pembeli dari luar desa atau luar daerah tidak boleh masuk di pasar ini. Ini penting dan sudah disepakati. Jadi jangan harap akan ada pedagang bermodal kuat di pasar ini. Tidak akan ada itu," tandas Victor Manbait, S.H, Direktur Lembaga Advokasi Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) NTT.

Lakmas NTT adalah salah satu lembaga yang mempelopori digelarnya dialog tapal batas yang melibatkan ribuan warga dari 24 desa di sepanjang garis perbatasan TTU/RI - Oecusse/RDTL.

Sedangkan barang-barang sembako yang diperjual-belikan di Pasar Puah Manus ini, rinci Manbait, yaitu minyak goreng, minyak tanah, kopi, gula, daging/ikan, beras, jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian serta bumbu dapur.

"Di pasar ini juga diperbolehkan untuk berjual-beli hewan ternak besar dan kecil seperti sapi, kerbau, kambing, babi, anjing, kuda, ayam, bebek dan burung. Ada juga hasil pertanian dan sayuran serta pakaian," jelasnya.

Dari hasil dialog tapal batas, warga dua negara merekomendasikan beberapa hal terkait pembukaan Pasar Puah Manus di tapal batas. Pertama, pasar ini hanya bisa dibuka jika pemerintah segera memberlakukan Kartu Pas Lintas Batas (PLB). Artinya yang datang ke pasar harus menunjukkan kartu PLB. Kedua, barang yang diperjualbelikan di pasar ini, adalah barang resmi yang dibeli atau dimiliki yang dibuktikan dengan surat kepemilikan, misalnya surat keterangan kepemilikan ternak dari pemerintah desa. Ketiga, harga barang

sesuai kesepakatan pasar sedangkan mata uang atau kurs mata uang dalam transaksi jual-beli disepakati secara bersama-sama.

Dari jalan tikus ke gedung parlemen

"DARI "jalan tikus" ke Gedung Parlemen National di Dili, ibukota Republic Democratic Timor Leste, alangkah jauh dan lamanya," tukas Nona Ermelinda Booqui Fai (29), staf Fundacao Fatu Sinai Oecusse (FFSO), yang berbincang-bincang dengan Pos Kupang saat jeda makan siang dalam dialog tapal batas di Napan, Miomaffo Timur, baru-baru ini. Gadis hitam manis ini sengaja menggunakan metafora untuk melukiskan betapa sulitnya menunggu kepastian persetujuan politik dari para anggota parlemen di Dili atas rekomendasi hasil dialog yang mendesak diberlakukannya kartu Pas Lintas Batas (PLB). Nona Ermelinda adalah sarjana pertanian, jebolan dari Universitas Wasa Manggala, Yogyakarta. Selesai kuliah, ia pulang kampung halamannya di Districk Oecusse, salah satu daerah enclave RDTL.

Ia sangat prihatin terhadap kehidupan penduduk di sepanjang garis perbatasan RI - RDTL. Ia lalu bergabung dengan LSM FFSO, sebagai koordinator pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Di LSM yang peduli kepada masyarakat miskin di tapal batas ini, ia coba mengubah pola pikir warga tentang bagaimana cara menatap masa depan secara optimis.

Ia mengatakan, rekomendasi tentang pemberlakuan kartu PLB di tapal batas ini sebenarnya sudah dibuat sejak tahun 2003 lalu. "Saat itu FFSO dan Lakmas NTT sudah membuat rekomendasi soal pentingnya kartu PLB diberlakukan di tapal batas, setelah menggelar dialog tapal batas dengan warga di enam titik. Dan rekomendasi itu dibuatkan Memorandum of Understanding (MoU) dan sudah ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU/RI) dengan pemerintah otonomi Districk Oecusse (RDTL)," tandasnya.

Pada prinsipnya, lanjutnya, penduduk di sepanjang garis perbatasan serta dua pemerintah daerah di perbatasan menaruh harapan besar agar kartu PLB ini segera diberlakukan. "Selain untuk mengeliminir perdagangan ilegal melalui "jalan tikus" yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM, kartu PLB juga sebagai alternatif untuk mendapatkan izin

melintas tapal batas secara murah, mudah, aman dan tertib," tukas Nona Ermelinda. Namun rekomendasi itu ternyata mentok di Gedung Parlemen National di Dili, ibukota RDTL.

Alasannya macam-macam. Intinya menyebutkan bahwa konflik politik di tubuh pemerintah RDTL serta perbedaan pandangan tentang kebijakan luar negeri di antara sesama anggota Parlemen National tentang pemberlakuan kartu PLB, membuat Presiden Parlemen National RDTL, Fernando Lasama de Araujo, ragu mengambil keputusan penting ini.

Namun pada tanggal 24 Januari 2008 atau setelah lima tahun kemudian, Direktur Departemen Bilateral Kementerian Luar Negeri Timor Leste, Marcos da Costa, memberi sinyal PLB segera diberlakukan mulai bulan Juli 2008. Agenda pembahasan soal ini sudah dibicarakan dengan Parlemen National di Dili. Kabar baik ini ibarat setitik air di oase yang sudah mengering di padang gurun. Semua berharap dan menanti dengan cemas realisasi kabar penting ini.

Namun 18 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 11 Februari 2008 sekitar pukul 04.30 Wita, terjadi peristiwa kudeta berdarah di Kota Dili, yang dilancarkan tentara pemberontak yang dipimpin Mayor Alfredo Reinado. Presiden RDTL, Ramos Horta, tertembak dan terluka lalu dilarikan ke Darwin, Australia Utara. Sementara Perdana Menteri RDTL, Xanana Gusmao, selamat ketika hendak diculik. Ia melarikan diri bersama sopir pribadinya saat tentara pemberontak mulai membakar rumahnya. Situasi politik di negara kecil, yang sebelumnya mulai kondusif, berubah drastis. Akibatnya agenda politik terkait kebijakan luar negeri yang hendak dibahas menjadi kacau. Termasuk menunggu keputusan Parlemen National tentang apakah kartu PLB segera diberlakukan di sepanjang garis perbatasan RI - RDTL atau tidak. Semua ini praktis dilupakan, energi politik lebih ditujukan kepada bagaimana keamanan dan ketertiban di Kota Dili dan daerah sekitarnya dikendalikan dan dipulihkan.

"Sial memang. Tapi mau bagaimana lagi? Meski demikian, penduduk di sepanjang garis perbatasan RI - RDTL tidak terpengaruh oleh konflik berdarah di Kota Dili. Buktinya, sudah lima hari tidak ada eksodus terkait kekhawatiran bahwa kondisi akan menjadi tidak terkendali lagi. Ternyata, semua aman dan tidak ada pengaruhnya sama sekali," tandas

Direktur Lakmas NTT, Victor Manbait, S.H, di Kefamenanu, Jumat (15/2/2008) siang. Menurut Manbait, kesabaran benar-benar sedang diuji. "Ini soal waktu saja. Saya yakin pihak Kementerian Luar Negeri RDTL dan Parlemen National di Dili akan membuka kembali agenda politik untuk membahas soal pemberlakuan kartu PLB," ujarnya yakin. Ditanya bagaimana pendapatnya tentang pandangan sejumlah kalangan bahwa kartu PLB bakal sulit direalisasikan karena belum jelas batas teritorial di darat dan laut antara RI dan RDTL serta belum disetujui dunia internasional, Manbait justru menepis anggapan itu dan menilainya sebagai kekhawatiran yang berlebihan. "Jika batas teritorial di laut belum jelas, iya. Tapi di darat tidak ada yang tidak jelas. Semua sudah jelas, kecuali beberapa titik di garis perbatasan yang masih dipersoalkan," tandasnya.

Tapi titik batas yang dipersoalkan itu, demikian Manbait, sudah disepakati untuk dijadikan zona damai dan zona bebas atau zona tidak bertuan. Artinya di titik yang disengketakan itu, tidak ada aktivitas apa pun. Dan itu sudah disepakati. Di garis perbatasan TTU - Oecusse, ada lima titik yang disengketakan. Tapi sudah diselesaikan. Dan satu titik sengketa sedang dibahas di PBB. Dan untuk sementara dijadikan zona damai. "Titik batas yang sudah disepakati oleh warga dua negara di tapal batas itu harus diakui oleh dunia internasional. Jadi ada anggapan yang salah bahwa jika dunia internasional mengakui, baru sebuah batas negara diakui. Itu keliru besar. Justru dunia internasional mengikuti dan menyetujui bila warga dua negara di tapal batas sudah sepakat menunjuk batas-batas teritorial secara jelas," tandasnya.

Di laut pun, demikian Manbait, hukum internasional menghormati keputusan warga lokal tentang batas teritorial di perairan laut. "Ada hukum internasional yang menghormati kearifan lokal tentang batas-batas teritorial di laut. Hukum internasional juga mengakui kearifan lokal tentang lokasi penangkapan ikan bersama antara dua warga negara. Jadi tidak perlu dibuat jadi sulit. Yang sulit sebenarnya bagaimana negosiasi politik itu bisa jalan dengan aman dan damai untuk melahirkan kesepakatan politik tentang batas teritorial," ujarnya.

Terkait dengan pemberlakuan kartu PLB itu, lanjutnya, untuk sementara dapat diberlakukan di darat saja. "Saya ingatkan, justru negara aman dan damai datangnya dari tapal batas. Bila hubungan kekerabatan terjalin dan terpintal rapat dan rapi antara dua

warga negara di tapal batas, pasti semua menjadi aman dan damai. Itu hanya dimungkinkan bila ada kontak sosial, ekonomi dan budaya antarwarga dua negara di tapal batas secara santun dan bermartabat. Sarana kontak adalah kartu PLB, selain paspor dan visa," tandas Manbait. Semoga! **(habis)**